



THE 11<sup>th</sup> FIPA  
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP  
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

PENGARUH PERSONAL, POLITIK BACKGROUND, PENGETAHUAN ANGGARAN  
TERHADAP PERAN DEWAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
DIMODERASI FL

<p><b>Wiwin Meika Dewi<sup>1</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun wmdjaiman@gmail.com</p>	<p><b>Elva Nuraina<sup>2</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun Elvanuraina99@gmail.com</p>
<p><b>Juli Murwani<sup>3</sup></b> Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun jmurwani@unipma.ac.id</p>	

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, dan *financial literacy* sebagai variabel moderasi pada DPRD Kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 responden, yang merupakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Madiun Periode 2014-2019. Teknik pengambilan sampel berjenis sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Personal Background* dan *Political Background* tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah., Sedangkan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. *Financial Literacy* tidak memperkuat pengaruh *personal background*, *political background*, pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Personal Background*, *Political Background*, *Financial Literacy*,  
Pengawasan Keuangan Daerah.

**PENDAHULUAN**

Indonesia pernah menerapkan kebijakan sentralisasi pada masa ordebaru. Kebijakan sentralisasi pada kenyataannya hanya mensejahterakan beberapa golongan dan daerah saja, serta mengakibatkan ketimpangan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terlalu dominan terhadap pemerintah



**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

daerah, akibatnya pemerintah daerah tidak leluasa dalam mengambil kebijakan daerahnya sendiri. Kebijakan sentralisasi yang hanya bersifat *top down* menyebabkan semua perencanaan dan keputusan terpusat pada pemerintah pusat, sehingga penerapan sentralisasi akan sulit diimplementasikan di Indonesia dengan wilayah yang luas, terpisah jarak dengan banyaknya pulau dan perbedaan geografis antara satu kawasan dengan lainnya. Wilayah dengan keadaan geografis yang sulit untuk diakses akan terisolir dan pada akhirnya tertinggal jika kebijakan sentralisasi terus diterapkan. Lahirnya gerakan reformasi memicu untuk dikoreksinya sederet kebijakan pemerintah, termasuk didalamnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berupa perubahan kebijakan sentralisasi kedesentralisasi. Dirubahnya kebijakan menjadi desentralisasi diharapkan dapat memacu kreativitas dan memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan memutuskan kebijakan di daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, didukung pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakukannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah daerah lebih leluasa karena diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengendalikan semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran aktif masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam nasional secara seimbang dan merata yang nantinya dapat tercipta kesinambungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Implementasi otonomi daerah secara tepat diharapkan dapat menangani permasalahan yang ada saat masa orde baru.

Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas manajemen keuangan daerah. Berlakunnya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, maka akuntabilitas pemerintah daerah menjadi pertanggungjawaban yang bersifat horizontal yaitu kepada masyarakat melalui DPRD yang sebelumnya bersifat masih bersifat vertikal (pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa: 1. Pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2. Serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pihak eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di poin satu tersebut, diperkuat pula dalam pelaksanaannya yang termuat dalam Undang-Undang



**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penerjemah atau bentuk pendeskripsian rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu satu tahun yang sangat berkaitan dengan kepentingan rakyat yang orientasinya pada kesejahteraan khalayak banyak. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang selama ini terjadi. Hal ini sangat penting untuk diimplementasikan, dimaksudkan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran. Pada kenyataan di lapangan, masih terjadi beberapa kasus yang dapat dikarenakan kurang optimalnya pengawasan. Kasus penyalahgunaan wewenang terjadi diberbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Madiun yaitu kasus dugaan korupsi dana rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun anggaran 2015 senilai dua miliar rupiah, yang saat ini “SU” sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani oleh Kejari Mejayan (Surya.co.id, Juli 2017). Permasalahan tersebut dapat timbul dikarenakan kurangnya peran DPRD dalam keseluruhan proses rancangan APBD. Bila ditinjau dari pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melaksanakan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga tersebut.

Selain kasus yang bersifat negatif, saat ini Kabupaten Madiun masih terus berbenah dalam rangka perpindahan Ibu Kota Kabupaten yang sebelumnya bertempat di Kota Madiun sekarang berpindah ke Mejayan.

Perpindahan tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Tentu dengan adanya perpindahan ini, banyak

infrastruktur yang dibangun untuk operasional pemerintahan di tempat yang baru. Hal ini terbukti, bahwasannya dikawasan Mejayan sudah berdiri Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yang disusul pembangunan infrastruktur penunjang lainnya. Pembangunan tersebut tentu dianggarkan dengan jumlah yang tidak sedikit setiap tahunnya. Sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan, diantaranya pihak eksekutif, pihak legislatif serta peran aktif dari masyarakat untuk mengawal anggaran tersebut agar sesuai dengan prioritas dan tujuannya. Pengawasan sangat penting dilakukan, untuk memastikan telah selaras antara penyelenggara tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil





**THE 11<sup>th</sup> FIPA  
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP  
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

guna (Makeuda, 1981 dalam Winarna Murni, 2007).

Kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas anggotanya, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD (Syahrudin dan Taifur dalam Winarna dan Murni 2007). Sedangkan Yudoyono (dalam Winarna dan Murni 2007) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya memahami dengan baik hak, tugas dan wewenangnya serta cakap dalam mengaplikasikannya, didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan. Individu memiliki peran besar untuk memenuhi kualifikasi tersebut. Penelitian ini, akan menguji kualifikasi tersebut meliputi *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran serta *financial literacy*.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Personal Background*, *Political Background*, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dan *Financial Literacy* Sebagai Variabel Moderasi Pada DPRD Kabupaten Madiun”. Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Winarna dan Murni (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan hanya di DPRD di Kabupaten Madiun karena beberapa alasan yang telah dipaparkan. Selain itu, penelitian dibidang pemerintahan masih jarang dilakukan, dan diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap pihak terkait. Perbedaan lainnya, penelitian ini menambahkan variabel moderasi, yaitu *Financial Literacy*.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel independen meliputi *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel dependennya adalah peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, serta dimoderasi oleh *financial literacy*. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan *non probability sampling* yaitu sampel jenuh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner atau angket yang disebar dan nantinya diisi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun periode 2014-2019 yang berjumlah 45 responden. Skala likert digunakan untuk pemberian skor dalam penelitian ini, sehingga memudahkan responden dalam menjawab item pernyataan yang diajukan. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat maupun persepsi individu tentang suatu fenomena tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah dengan uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas, yang kedua analisis deskriptif

(meliputi mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi). Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2012:40), uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji t adalah uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Priyatno :2012:90). Selanjutnya untuk menguji pengaruh moderasi digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah bentuk regresi yang dirancang secara hirarki untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketiga atau moderating. *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji adanya efek moderasi apakah mengandung unsur interaksi (variabel independen dengan variabel moderasi). Persamaan atas *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_4 + \beta_3 X_1 * X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

$\alpha$  = Konstanta atau *intercept*

$\beta$  = Koefisien variabel independen

X<sub>4</sub> = Variabel Moderasi

$\varepsilon$  = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan dengan menghitung rumus statistik. Item dinyatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah dilakukan perhitungan menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk variabel *personal background* (X<sub>1</sub>), *political background* (X<sub>2</sub>), pengetahuan dewan tentang anggaran (X<sub>3</sub>), dan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah (Y), serta *financial literacy* (Moderating).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan (konsistensi) instrumen (alat ukur) berupa kuesioner. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach's alpha*. Menurut Sekaran dalam Priyatno (2011) Item soal dari setiap variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai



**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

*cronbach's alpha* kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan 0,8 adalah baik. Hasil yang telah dilakukan peneliti, mendapatkan bahwa seluruh item soal kuisioner tiap item soal dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel karena memiliki nilai diantara 0,6 – 0,7 dalam artian item soal dapat diterima dan dinyatakan reliabel serta dapat selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian.

Langkah selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Pada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* (K-S). Apabila nilai probabilitas > nilai  $\alpha = 0,05$  maka data terdistribusi secara normal dan apabila nilai probabilitas < nilai  $\alpha = 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil nilai *Assymp Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang akan dianalisis terdistribusi normal. Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10 maka dikatakan bahwa ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini dinyatakan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen memiliki nilai > 0,10, dan nilai *VIF* < 10. Maka dapat dinyatakan bahwa setiap variabel terbebas dari masalah multikolonieritas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedstisitas. Uji heterokedastisitas pada data ini dilakukan dengan metode grafik *scatterplot*. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, titik-titik menyebar tidak beraturan di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedstisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin – Watson (DW test). Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi di atas nilai DW sebesar 1,791 sedangkan  $du = 1,720$  dan  $4-dw = 2,209$ . Uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai  $du < d < 4-dw$  ( $1,720 < 1,791 < 2,209$ ), artinya tidak ada autokorelasi.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data layak untuk dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Adapun hasil dari uji regresi linier berganda dapat dilihat pada lampiran 6 tabel 5. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

$$Y = 16,934 + 0,151.X_1 - 0,033.X_2 + 0,290.X_3$$

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji MRA. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 7. Uji hipotesis pertama berdasarkan hasil uji statistik menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,344 lebih besar dari 0,05 ( $0,344 > 0,05$ ) maka hipotesis penelitian ini menerima menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Dengan demikian, uji t dapat disimpulkan bahwa *personal background* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah, hal ini dikarenakan konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan untuk membahas dan mengawasi jalannya realisasi dalam pengelolaan APBD atau keuangan daerah. Konsekuensi tugas yang ada tersebut menyebabkan *personal background* dari anggota dewan tidak menjadi suatu hal yang berpengaruh terhadap peran anggota dalam pengawasan keuangan daerah. Baik dari jenis kelamin, tingkat dan bidang pendidikan bukan merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal yang lebih penting adalah komitmen dan tanggung jawab yang harus diemban oleh anggota dewan, sebagai orang yang telah mewakili aspirasi dari masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan para anggota dewan dapat diikutsertakan dalam seminar, pelatihan, serta workshop terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Supaya anggota dewan lebih memiliki kualifikasi secara optimal.

Uji hipotesis kedua, Uji t untuk variabel *political background* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,656. Maka nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 ( $0,656 > 0,05$ ). Dengan demikian, dalam penelitian ini menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Dapat disimpulkan bahwa *political background* tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini bila ditelusuri dari indikator *political background* dalam penelitian ini adalah pengalaman di DPRD dan jabatan anggota dewan dalam partai politik yang mengusungnya. Dilihat dari data yang telah didapatkan peneliti. Periode lama kerja anggota dewan menjabat, ditemukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Madiun periode 2014-2019 merupakan wajah-wajah baru, dari 45 anggota dewan yang menduduki kursi sebanyak 23 orang atau dengan prosentase 51%. Selain itu, jabatan anggota dewan dalam partai politiknya tidak memberikan pengaruh dalam pelaksanaan tugasnya di DPRD. Walaupun dipartai politik, anggota dewan menjabat sebagai fungsional maupun struktural partai, para anggota dewan dalam pelaksanaan tugas sudah memiliki prioritas pembahasan dalam sidang yang dilaksanakan. Dengan demikian, baik anggota baru maupun lama akan sama-sama belajar dalam pelaksanaan tugas yang salah satunya dalam hal perancangan dan pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis ketiga Hasil uji t untuk pengetahuan dewan tentang anggaran menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,002. Jadi, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,005 ( $0,002 < 0,005$ ). Dengan demikian penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan dewan



**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

tentang anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran yang berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah sangat logis, karena dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah seorang anggota dewan harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan terkait dengan anggaran. Pengetahuan tersebut mutlak digunakan untuk mendeteksi segala kemungkinan yang ada dalam keuangan daerah, baik anggaran tersebut memang sudah sesuai dengan rencananya, maupun ada penyimpangan dalam realisasi anggaran. Oleh karena itu, pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi peranannya dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengujian hipotesis keempat, kelima dan keenam menggunakan MRA. MRA merupakan model regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dalam regresi terdapat interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan tingkat signifikansi  $< 0,05$ . Hasil pengujian tertera dalam lampiran. Hasil koefisien regresi *Financial Literacy* memoderasi *Personal Background* ( $X_1, X_4$ ) sebesar 0,063, hal ini menunjukkan bahwa saat *financial literacy* memoderasi *personal background* dan variabel lain dianggap tetap, maka akan terjadi kenaikan satu kesatuan sebesar 0,063 pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya *financial literacy* dikarenakan, dalam pengawasan keuangan daerah para anggota dewan sudah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah rancangan dan penetapan, serta pengawasan keuangan daerah, dengan demikian walaupun tidak memiliki *financial literacy personal* secara sangat mumpuni. Para anggota dewan sudah terbiasa dengan beban tugas yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Pengujian hipotesis kelima, menunjukkan hasil Koefisien regresi *financial literacy* memoderasi *political background* ( $X_2, X_4$ ) bernilai positif dengan nilai sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa saat *financial literacy* memoderasi *political background* maka akan terjadi kenaikan satu kesatuan sebesar 0,7 pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dengan asumsi variabel lain tetap. Hal tersebut terjadi karena walaupun anggota dewan secara individu tidak mempunyai *financial literacy* yang cakap, setelah duduk dikursi dewan tetap memiliki tuntutan tugas yang sama yaitu menetapkan rancangan anggaran bersama pihak terkait salah satunya kepala daerah, yaitu Bupati Madiun. Setelah penetapan, selanjutnya anggaran tersebut direalisasikan dan di tahap ini peran anggota dewan sangat dibutuhkan untuk mengawal anggaran tersebut sesuai prioritas dan tujuannya. Dengan demikian, walaupun anggota dewan memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan di partai politik dan duduk dikursi dewan. Semua harus tetap pada prioritas dan tuntutan tugas, dalam hal ini adalah pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan hasil koefisien regresi *financial literacy* memoderasi pengetahuan dewan tentang anggaran ( $X_3, X_4$ ) bernilai positif dengan nilai sebesar 0,21, hal ini menunjukkan





**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

bahwa saat *financial literacy* memoderasi pengetahuan dewan tentang anggaran maka akan terjadi kenaikan satu kesatuan sebesar 0,21 pada peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini dikarenakan, dengan anggota dewan sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang anggaran, didukung dengan tuntutan untuk selalu transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan anggaran. Pengetahuan anggaran sudah menjadi hal mutlak yang harus dikuasai, selain itu anggota dewan juga harus terus belajar dalam menghadapi dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, baik pada tahap perencanaan, realisasi sampai tahap pertanggung jawaban APBD. Karena hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang salah satunya adalah pengawasan keuangan daerah *financial literacy* tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam peran anggota dewan saat pengawasan keuangan daerah.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah *Personal background* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. *Political background* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. *Financial Literacy* tidak memperkuat pengaruh *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Untuk peneliti selanjutnya, dapat memperluas jangkauan penelitian dari segi wilayah guna mendapatkan sampel yang lebih banyak, supaya penelitian selanjutnya dapat digeneralisasikan. Selain itu, diharapkan dapat menambahkan indikator yang lebih spesifik supaya lebih tepat dalam mempresentasikan dari tujuan penelitian yang dilakukan selanjutnya. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan wawancara dengan responden untuk memperkuat dan dapat sebagai pembandingan dengan data yang didapat dari hasil kuisioner.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, N. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)*. *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bastian, Indra. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Dewi, I. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas*



THE 11<sup>th</sup> FIPA  
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP  
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

*Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD),  
Universitas Diponegoro:*

*Institutional Repository*

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi- Edisi 4*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Halim A, dan Kusufi MS. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huston, SJ. (2010). *Measuring Financial Literacy*. The Journal of Consumer Affairs, Vol. 44 No. 2.
- Indrawan & Yaniawati. (2014). *Metodologi Penelitian- Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusufi M & Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Arfan. (2010). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mabyakto, G. (2017). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa: Studi Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Santa Dharma*. Yogyakarta: Skripsi di terbitkan
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Pramitha & Andriyani.(2010). *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)*. SNA XIII
- Priyatno, Dwi. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_ (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_ (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_ 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.  
 Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
 Siregar, S. (2014). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan*

*Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sari, Dwiva. (2016). *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Padang

Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.

Winarna J, dan Murni S. (2007). “*Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*” Dalam Prosiding SNA X. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Hasil
<i>Personal Background (X1)</i>	0,736	Reliabel
<i>Political Background (X2)</i>	0,728	Reliabel
<i>Political Background (X2)</i>	0,728	Reliabel
<i>Financial Literacy (Moderator)</i>	0,668	Reliabel
Peran Anggota Dewan dlm Pengawasan Keuangan	0,698	Reliabel

Lampiran 2

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		45
<i>Normal Parameter</i>	<i>Mean</i>	0,000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,79503618
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,07



	<i>Positive</i>	0,07
	<i>Negative</i>	-0,068
<i>Test Statistic</i>		0,07
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200

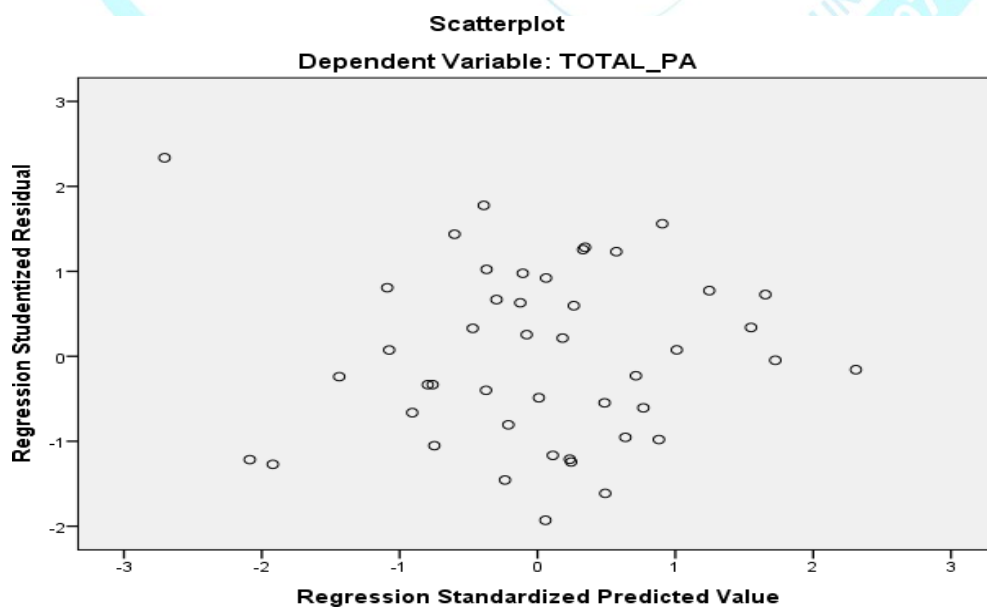
Lampiran 3

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel independen</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Interprestasi</b>
<i>Personal Background</i>	0,944	1,059	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Political Background</i>	0,903	1,107	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Financial Literacy</i>	0,861	0,861	Tidak terjadi multikolinieritas

Lampiran 4

**Gambar 1. Uji Heterokedastisidas**





**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---





**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---







**THE 11<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

---

